

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)**

SKRIPSI



**Oleh :
IDA PUSPITANINGRUM
12133100071**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2016**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah. Objek dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diambil pada tahun 2010-2013. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, Laporan Realisasi APBD.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Regionally Original Income (PAD) to the Regional Expense and influence of General Allocation Fund (DAU) to Regional Expense. The object of this research are 35 Districts / cities in Central Java province were taken in 2010-2013. The data analyzed in this research is secondary data obtained from the Budget Realization Statement of Revenue and Expenditure (APBD) Districts / City in Central Java province obtained from the Central Statistics Agency website (www.bps.go.id). The samples in this study using census method by taking the entire population. From these data, then analyzed using multiple linear regression technique with SPSS 16. The results of this study indicate that the Regionally Original Income (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant impact on Regional Expense.

Keywords: Regionally Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Regional Expense, Budget Realization Report Revenue and Expenditure (APBD).

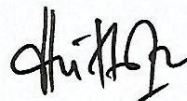
PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**



Yogyakarta, 11 April 2016

Pembimbing



Vidya Vitta Adhivinna, S.E, M.Si, Ak.

NIS. 19780429 200404 2 001

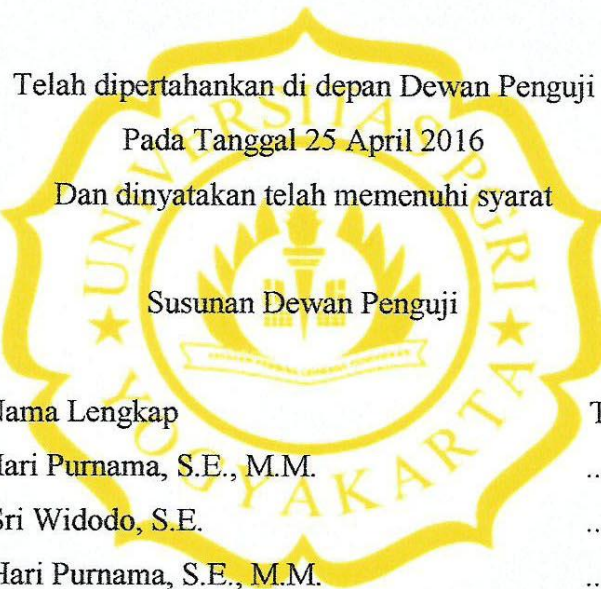
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)**

Oleh :

IDA PUSPITANINGRUM

NPM. 12133100071



	Nama Lengkap
Ketua	: Hari Purnama, S.E., M.M.
Sekretaris	: Sri Widodo, S.E.
Penguji I	: Hari Purnama, S.E., M.M.
Penguji II	: Vidya Vitta Adhivinna, S.E., M.Si., Ak.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 25 April 2016



Hari Purnama, S.E., M.M.

NIS. 19620221 199503 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Puspitaningrum

No. Mahasiswa : 12133100071

Program studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, dikenakan sanksi tergantung dari berat ringannya tindakan plagiasi yang dilakukan. Sanksi dapat berupa perbaikan skripsi dan ujian ulang, melakukan penelitian baru, atau pencabutan ijazah S1.

Yogyakarta, 11 April 2016.

Yang membuat pernyataan,



(Ida Puspitaningrum)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al Baqarah : 153)

Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yg beriman di antara kamu dan orang-orang yg diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS.Mujadalah: 11)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)

You can if you think you can

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Suami yang terkasih
- Kedua anak jagoanku
- Seluruh sahabat-sahabatku
- Keluarga besarku yang saya sayangi
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH).” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi di Universitas PGRI Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, petunjuk, dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Hari Purnama, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
2. Ibu Vidya Vitta Adhivinna, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dalam penulisan skripsi ini, memberikan nasehat, masukan-masukan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sri Widodo, SE selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.

4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Seluruh staf akademisi, staf tata usaha, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
5. Kedua orang tua penulis (Bapak Sarjono dan Ibu Surtini) yang telah memberikan doa, membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
6. Suami terkasih (Cahya Hidayat) yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Kedua anak penulis (Kenzie Bagus Adyatama dan Khalfani Arkananta Syafiq) yang menjadi motivasi penulis agar lebih maju.
8. Keluarga besar H.Sariman (Mertua) yang telah menjadi bagian hidup dari penulis yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat kuliah angkatan 2012 jurusan akuntansi dan manajemen yang telah menjalin persahabatan selama ini, saling menyemangati untuk rajin kerja dan kuliah.
10. Teman-teman KKN di Panti Sosial Pamardi Putra tahun 2015 yang telah bekerja sama sehingga menjadi tim KKN yang solid.

11. Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta dan Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta yang telah menyediakan seluruh materi dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan motivasi, inspirasi, bantuan, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis. Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis sadar bila masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 11 April 2016.

Penulis



Ida Puspitaningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Penelitian terdahulu.....	23
C. Kerangka Berpikir	25
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
B. Metode Sampling	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	35

E. Metode Analisis.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Statistik Deskriptif.....	47
C. Hasil Asumsi Klasik	50
D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	55
E. Hasil Pengujian Hipotesis	58
F. Pembahasan Hipotesis	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Keterbatasan Penelitian	64
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir	27
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.4 Hasil Uji koefisien Determinasi	55
Tabel 4.5 Hasil uji F.....	56
Tabel 4.6 Hasil uji t.....	57
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Normal <i>Probability Plot</i>	51
Grafik 4.2 <i>Scatterplot</i>	54

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Laporan Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Daerah	70
LAMPIRAN 2 Hasil Output SPSS	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2005). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan teori *agency*, akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2005) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan kemampuannya. Ini merupakan tantangan bahwa daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh (Pratiwi, 2007).

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain

dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah ”dilaporkan” diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan di luar PAD karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan untuk pemberian yang non PAD bersifat terikat (Trisnawati, 2015).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan SumberDaya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhan. Sedangkan alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien (Rahmawati,2010).

Beberapa penelitian telah digunakan untuk menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Kurniawati (2010) melakukan penelitian pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia dengan hasil bahwa secara terpisah PAD dan DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Namun secara terpisah pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur rumah tangga daerah.

Trisnawati dan Vidya (2015) melakukan penelitian pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah di DIY dan Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Rahmawati (2010) melakukan penelitian pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengambil periode tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dikarenakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya berbeda-beda. Penelitian ini mengacu pada penelitian Rahmawati (2010) yang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah dengan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggunakan periode tahun 2007-2009. Sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah dengan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggunakan periode tahun 2010-2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempertimbangkan keadaan geografis seperti batas daerah, karena dianggap dapat mempengaruhi perolehan PAD dan DAU di daerah. Dengan adanya batas daerah yang resmi maka bisa mengetahui batas status hukum, tanggung jawab pemerintahan, pajak, penentuan area guna untuk menghitung potensi sumber daya, jumlah penduduk, dan dana alokasi umum yang akan diterima pemerintah daerah. Dengan mengetahui itu semua, maka pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga akan mempengaruhi besarnya penerimaan dan pengeluaran pada daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Menganalisis apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah.
3. Menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bagian yang terdiri atas :

1. BAB I menjelaskan latar belakang yang mendasari muncul masalah dalam penelitian , rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian.
2. BAB II membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian dan menjelaskan penelitian dahulu yang terkait, menggambarkan kerangka teori, dan menarik hipotesis.
3. BAB III menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan sampel data yang lebih terperinci.
4. BAB IV memperlihatkan hasil dan pembahasan penelitian.

5. BAB V memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.